



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE KABUPATEN GRESIK
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018 – 2019
TANGGAL 17 JANUARI 2019**

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
JANUARI 2019**

LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE KABUPATEN GRESIK
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018 – 2019
TANGGAL 17 JANUARI 2019

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bupati Kabupaten Gresik yang dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terhadap pelaksanaan pelayanan publik

Saat ini, reformasi birokrasi terus dilaksanakan dan diperluas terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi 2015-2019 sasaran reformasi birokrasi antara lain: Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk melakukan reformasi agar dapat disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat melakukan perubahan mind set, budaya, dan struktur kelembagaan agar dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik menuju World Class Government 2025 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya terobosan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya melalui inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan prinsip kebaruan serta keunikan yang khas yang berbeda dengan yang lain. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dilakukan melalui kompetisi inovasi, sistem informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas, dan pemantauan yang berkelanjutan. Perubahan model pelayanan publik karena

penyelenggaraan inovasi pelayanan publik diharapkan dapat memberikan perubahan dan memperbaiki kualitas pelayanan menjadi lebih baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat perubahan tersebut.

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Gresik berjumlah 14 orang Anggota. Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari media cetak/sosial.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada 17 s/d 19 Januari 2019. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan panitia kerja spesifik ke Kantor Bupati Kabupaten Gresik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI dibidang pelayanan publik.

II. HASIL KUNJUNGAN

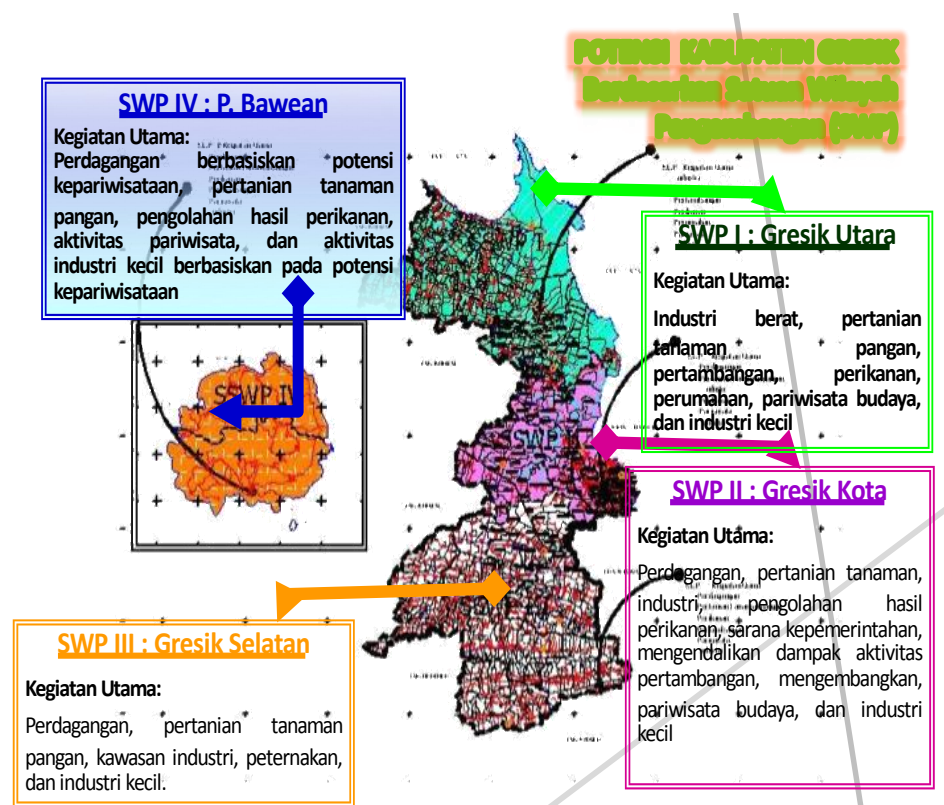
• Pemaparan Bupati Kabupaten Gresik

- a. Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 1.191,25 Km² yang terdiri dari 993,83 Km daratan dan 197,42 Km lautan. Wilayah administrasi Kabupaten Gresik terdiri atas 18 kecamatan, 20 kelurahan, dan 330 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebanyak 1.336.371 jiwa yang terdiri dari 672.583 penduduk laki-laki dan 663.788 penduduk perempuan. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gresik pendapatan berjumlah Rp.3.040.613.060.446,00 yang terdiri dari 1) Pendapatan Asli Daerah: Rp. 909.905.279.886,00 2) Dana Perimbangan: Rp.1.499.740.660.560,00 3) Lain-lain Pendapatan: Rp.630.967.120.000,00 dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp. 3.128.640.309.463,00,- Peningkatan PAD yang sangat pesat dari awalnya sekitar 190 milyar menjadi 909 milyar. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB dikenakan terhadap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Di Kabupaten Gresik terdapat kurang lebih 1983 industri baik industri besar maupun industri kecil. Semakin banyak peralihan hak atas tanah berarti semakin banyak investor masuk, maka jumlah pajak BPHTB semakin bertambah, pemanfaatan lahan semakin banyak (luas lahan yang sudah dibebaskan di Kabupaten Gresik sebanyak 2.200Ha), dan sektor industry menjadi berkembang pesat.

b. Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai pembangunan di berbagai sektor antara lain lapangan bola, bendungan, pelabuhan internasional di Kecamatan Manyar yang terhubung langsung tidak lagi transit/lewat singapura. Hal ini memungkinkan hasil pertanian/perkebunan import seperti kedelai-kedelai curah dari Amerika Serikat sudah bisa langsung masuk ke Kabupaten Gresik. Beberapa rencana pembangunan yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik antara lain:

- 1) Rencana pembangunan Kawasan agropolitan
- 2) Rencana Pembangunan gelanggang olahraga di Sidayu
- 3) Rencana Pengembangan Perumahan Gresik Selatan
- 4) Rencana Pengembangan Perumahan Berwawasan lingkungan
- 5) Rencana pembangunan Jalan tol Surabaya Mojokerto
- 6) Rencana pembangunan Islamic center, dan lain-lain

c. Potensi Kabupaten Gresik



d. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gresik berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Gresik sedang membangun Mal pelayanan publik yang akan menempatkan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan dapat dilakukan di satu tempat dan diharapkan berbagai perizinan yang dibutuhkan masyarakat akan selesai dalam waktu singkat. Hal lain juga dapat terlihat dari berbagai inovasi pelayanan publik yang telah diselenggarakan yang juga mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dan pihak lainnya. Inovasi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Gresik antara lain:

– **Kakekku Datang**

Kakekku Datang merupakan akronim dari Kartu Keluarga Ku Data Ulang. Program ini terinspirasi dari beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti adanya data ganda, data anomali, masih rendahnya capaian Akta Kelahiran terutama anak usia 0 sampai 18 tahun, dan masih minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan elemen data yang ada di Kartu Keluarga (KK). Pemerintah Kabupaten Gresik menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, integratif, dan responsif di tengah masyarakat melalui tiga strategi utama, yaitu: 1) membentuk downline, agar para petugas pelayanan administrasi kependudukan bisa share mengenai permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan 2) membuat aplikasi (sudah ada 6 aplikasi) 3) edukasi masyarakat, untuk memberi pemahaman dan kesadaran yang utuh kepada warga akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

– **Batas Petir**

Inovasi di sektor pelayanan publik di bidang kesehatan, yakni ‘Batas Petir’ atau Obati Sampai Tuntas Penderita Tuberculosis Multi Drug Resistant (TB MDR) yang dikembangkan oleh RSUD Ibnu Sina Gresik. Selama ini penanganan penderita TB MDR melalui ‘Batas Petir’ tersebut dapat meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka drop out pasien TB MDR. “Inovasi Batas Petir ini mengobati pasien TB MDR secara holistik. RSUD Ibnu Sina merupakan salah satu rumah sakit rujukan oleh sebab itu, masyarakat di luar Kabupaten Gresik juga turut mendapat manfaat dengan adanya inovasi pelayanan publik Batas Petir ini.

– **Sekoper, dan lain-lain**

Sekolah perempuan atau Sekoper yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KBPPA) Pemerintah Kabupaten Gresik mampu berdayakan perempuan dan tanggulangi kemiskinan. Perempuan-perempuan di Kabupaten Gresik diajari publik speaking, belajar pendataan kemiskinan, berkesenian dan menulis adalah metode-metode yang sudah dikembangkan selama ini. Hal ini membuktikan bahwa ada peningkatan kapasitas perempuan pedesaan menjadi kader-kader desa dan telah mempercepat terbukanya akses-akses dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu dengan menegaskan kepada para pegawai pemerintah untuk tidak menerima pungutan liar (uang/amplop) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Kabupaten Gresik memberikan punishment dan reward kepada pegawai yang dapat menjaga diri dari kemungkinan melakukan maladministrasi pelayanan publik.

e. Kepulauan Bawean sebagai tujuan wisata

Pemerintah Kabupaten Gresik membangun lapangan terbang yang menjadi sarana pendukung Kepulauan Bawean sebagai daerah tujuan wisata. Selain itu dibangun pula rumah sakit dan berbagai lokasi-lokasi wisata yang dapat menarik minat turis local maupun turis mancanegara.



- **Pemaparan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur**

Laporan pengaduan dugaan maladministrasi yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016. Instansi terlapor di Provinsi Jawa Timur yang paling banyak pengaduan dari masyarakat antara lain: Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kantor Pertanahan, dan Kepolisian. Laporan pengaduan di Kabupaten Gresik yang menempati 5 besar di Provinsi Jawa Timur (ada 15 pengaduan) yaitu: administrasi pertanahan, kepolisian, dan kependudukan. Namun laporan-laporan pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama dengan instansi terkait. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam sebelum mengambil keputusan terkait adanya dugaan maladministrasi selalu melakukan klarifikasi kepada terlapor dan melakukan pengumpulan data agar keputusan yang dihasilkan benar-benar tepat dan akurat.

- **Jawaban Pemerintah Kabupaten Gresik atas Pertanyaan dari Komisi II DPR RI**

PERTANYAAN 1 :

- Kebijakan/program pelayanan publik yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan publik :

Jawaban :

- a. Fasilitasi pelayanan dan edukasi masyarakat pengguna layanan sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS
- b. Deregulasi kebijakan di sektor pelayanan publik contoh :
 1. Pelayanan terintegrasi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui regulasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 2. Review Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016) yang saat ini sedang diproses.
 3. Penyederhanaan regulasi dan kebijakan produk-produk hukum seperti draft satuan pendidikan dasar dll.
- c. Memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan melalui :
 1. Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, contoh : komitmen penerapan azas transparansi pelayanan melalui penandatanganan pakta integritas seluruh jajaran mulai eselon II sampai dengan staf
 2. Usulan penetapan 10 OPD pelayanan publik menjadi Wilayah Zona Integritas WBK/WBBM.
- d. Melakukan inovasi pelayanan publik yang mendorong kemudahan pelayanan seperti :
 - ODS (Operasional Digital Storage) : alih media arsip manual ke arsip digital yang dilengkapi dengan account pemohon.
 - Fasilitasi layanan OSS dengan melalui pojok OSS/OSS corner
- e. Rencana untuk mengadakan mall pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam satu lokasi
- f. Melakukan deseminasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat termasuk update regulasi dan peraturan terkait perizinan.

PERTANYAAN 2 :

- Bagaimana Pemerintah Kabupaten Gresik menerapkan hal – hal terkait penyelenggaraan pelayanan publik :

Jawaban :

- a. Standar pelayanan publik telah disusun, saat ini sudah dalam bentuk draft.
- b. Pemanfaatan dan pengolahan sistem informasi pelayanan publik telah dilakukan secara terintegrasi melalui SIPPADU (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu) dan OSS (Online Single Submission) yaitu : Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS.
- c. Pengelolaan sarana dan atau fasilitas pelayanan publik dengan penyediaan gedung pelayanan PTSP serta ketersediaan sarana pendukung seperti fasilitas yang memadai, toilet bersih, ruang pelayanan yang nyaman, komputer dan printer yang memadai, dekat dengan fasilitas ibadah, tersedia arena bermain anak serta sarana bagi difabel.
- d. Besar/tarif pelayanan publik telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan diinformasikan secara luas di website www.dpmpptsp.gresikkab.go.id dan leaflet. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 bahwa yang ada retribusinya hanya pada pelayanan IMB, perpanjangan IMTA, trayek angkutan serta pelayanan pasar. Selain itu tidak ada biaya / GRATIS.

PERTANYAAN 3 :

- Bagaimana Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan integritas dan kualitas ASN dalam memberikan pelayanan publik :

Jawaban :

- a. Melalui komitmen bersama dengan penandatanganan pakta integritas seluruh jajaran dari kepala sampai staf untuk melayani masyarakat dengan azas good governance.
- b. Pembinaan serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan dengan muatan prinsip – prinsip pelayanan publik seperti bimtek, workshop dan pelatihan bagi frontliner serta diklat teknis bagi petugas pelayanan.
- c. Penerapan kode etik pegawai negeri sipil pada DPM PTSP yang memuat sanksi bagi pegawai yang melanggar peraturan pelayanan. Penerapan reward dan punishment bagi petugas pelayanan.
- d. Memasang banner, leaflet dan spanduk serta brosur-brosur yang berisikan himbauan untuk melaporkan oknum petugas terkait praktek-praktek KKN pada proses pelayanan.
- e. Contoh : Pejabat Eselon III yang di non Job kan dan staff yang diberhentikan dengan tidak hormat.

PERTANYAAN 4 :

- Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam hal :

Jawaban :

- a. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan dengan :
 - 1) Upaya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik yang saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik sedang berupaya keras untuk mendapatkan SAKIP dari BB menjadi A.
 - 2) Monev kinerja dipantau setiap bulan melalui pelaporan kinerja dengan format P1-P4 serta dikendalikan dengan aplikasi E-Controlling.
 - 3) Dilakukan desk oleh tim khusus seperti Tepra maupun Rapimsus guna mengevaluasi kinerja seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Gresik termasuk pelayanan publik.
- b. Efektivitas pengawasan dilakukan oleh internal dan eksternal. Internal oleh atasan langsung dan Tim SPIP yang telah dibentuk di tiap-tiap OPD serta dilakukan oleh Inspektorat sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK.
- c. Sistem pengaduan telah efektif melalui sms gateway (+6289527774449) di website dan email Dinas Penanaman Modal dan PTSP www.dpmpmsp.gresikkab.go.id. Dilakukan pula fasilitasi dengan berkoordinasi dengan pihak yang bersengketa dan melibatkan unsur perangkat desa serta instansi terkait sekaligus telah diatur melalui SOP pengaduan.
- d. Penerapan reward dan punishment telah dilakukan melalui pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya PNS, dilakukan pula usulan promosi bagi pegawai yang berprestasi serta kenaikan gaji berkala bagi yang telah memenuhi syarat. Sedangkan punishment diterapkan terhadap pegawai yang telah melanggar peraturan dalam melayani masyarakat seperti penundaan gaji berkala, penurunan golongan satu tingkat, peringatan lisan dan tertulis.

PERTANYAAN 5 :

- Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) :

Jawaban :

Khusus untuk difabel disediakan fasilitas seperti kursi roda, tersedia juga arena bermain anak

PERTANYAAN 6 :

- Bagaimana kerjasama / koordinasi pemerintah kabupaten Gresik dengan Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur dalam upaya pengelolaan dan penyelesaian pengaduan terhadap penyelenggaraan publik :

Jawaban :

Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan salah satu pelayanan publik yang berkomitmen langsung oleh KPK melalui aplikasi JAGA sekaligus bisa dimonitor 24 jam oleh KPK, Rencana Aksi KPK, LHKPN, dan Gratifikasi.

UNTUK DIREKOMENDASI :

Secara umum pemegang ijin lokasi tidak bisa menyelesaikan pembebasan tanah dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga, masyarakat yang tanahnya berada di dalam luasan lokasi yang telah diberikan ijin tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut (tidak bisa diperjualbelikan kepada pihak lain). Sementara pemegang ijin lokasi (perusahaan) tidak segera membebaskan dengan berbagai alasan. Untuk memberikan hak bagi pengusaha harus dapat melindungi hak dasar bagi pemilik lahan dengan mengkaji kembali ketentuan pasal 20 (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 14 Tahun 2018 tentang Ijin Lokasi.

• Jawaban Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Pertanyaan dari Komisi II DPR RI

1. Berapa jumlah personil yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Bagaimana status personil tersebut, dan apa saja tugas utama mereka.

Jawaban:

Jabatan	Jumlah	Status	Tugas Utama
Kepala Perwakilan	1 orang	Pegawai tidak tetap (jabatan)	Memimpin pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan pengelolaan manajemen perkantoran.
Asisten	9 orang	Pegawai tetap	<p>2. Menerima dan memverifikasi laporan masyarakat atas dugaan mal administrasi dalam pelayanan publik;</p> <p>3. Menyelesaikan laporan-laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik;</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan pencegahan adanya maladministrasi dalam pelayanan publik seperti melakukan sosialisasi, kajian, evaluasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>
Sekretaris	1 orang	PNS	Melaksanakan operasional kantor baik berhubungan dengan urusan rumah tangga. Tata usaha dan pengelolaan barang milik negara.
Bendahara	1 orang	PNS	Mengelola dan bertanggungjawabkan keuangan operasional Perwakilan Ombudsman RI.
Tenaga keamanan	2 orang	Pegawai kontrak	Menjaga keamanan kantor perwakilan.
Pramubakti	1 orang	Pegawai kontrak	Membersihkan kantor perwakilan dan tugas lain yang ditugaskan Kepala Perwakilan.

2. Apa saja permasalahan utama yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Jawaban:

- a. Kurangnya jumlah personil dalam melaksanakan tugas Ombudsman;

- b. Anggaran yang sedikit (kurang lebih hanya 700 juta setiap tahun);
 - c. Tidak memunyai kantor sendiri sebagai representative Lembaga (selama ini pinjam pakai dari asset Pemerintah Provinsi Jawa Timur);
 - d. Minimnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas Ombudsman;
 - e. Masih rendahnya komitmen penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman dalam rangka perbaikan pelayanan publik.
3. Berapakah jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur hingga saat ini. Bagaimanakah perkembangan jumlah pengaduan masyarakat itu dari tahun ke tahun.

Jawaban:

Tahun	Jumlah Laporan
2014	336
2015	350
2016	345
2017	356
2018	405

Dari tahun ke tahun jumlah pengaduan mengalami trend kenaikan dengan rata-rata 350 pengaduan dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 3000 orang setiap tahunnya. Sebagai contoh pengaduan yang berhubungan dengan ganti rugi dan pembebasan lahan untuk keperluan jalan tol dilakukan oleh satu orang tetapi kemanfaatan yang didapat bisa dinikmati oleh lebih dari 200 orang setelah adanya perhitungan ulang.

4. Dari jumlah pengaduan yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Apa saja kasus mal-administrasi yang paling menonjol, dan bagaimana pula tindak lanjut dari pengaduan-pengaduan tersebut.

Jawaban:

Dari jumlah pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, substansi yang paling banyak diajukan adalah masalah pelayanan pertanahan, kepolisian, kependudukan, serta kepegawaian. Dalam rangka penyelesaian laporan Ombudsman RI

Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan pengawas internal dan atasannya untuk menyelesaikan laporan. Contoh: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur berkordinasi dengan Kanwil Pertanahan untuk menyelesaikan laporan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga berkordinasi dengan Irwasda Polda Jawa Timur untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat berhubungan dengan pelayanan kependudukan dan kepegawaian kita berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.

5. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka sosialisasi terhadap keberadaan Ombudsman serta dalam rangka membangun jaringan kerja.

Jawaban:

- a. Melakukan sosialisasi di seluruh pemerintah daerah terutama kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik;
- b. Membangun sahabat Ombudsman dalam bentuk komunitas. Sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk sahabat Ombudsman yaitu: Santri Peduli Pelayanan Publik di Jombang, Santri Ombudsman di Surabaya, Perempuan Peduli Pelayanan Publik di Bondowoso, Komunitas Nelayan Peduli Pelayanan Publik di Pacitan, Komunitas Kelompok Rentan di Surabaya, Komunitas Perguruan Tinggi Peduli Pelayanan Publik di Surabaya, dan Institute Pelayanan Publik di Bojonegoro.

6. Bagaimana kerjasama/koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya pengelolaan dan penyelesaian pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Jawaban:

- a. Penerimaan dan tindak lanjut penyelesaian laporan dipimpin Sekretaris Daerah maupun para asisten;
- b. Aparatur Pemerintah Kabupaten Gresik menghadiri undangan klarifikasi di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- c. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur diundang sebagai narasumber dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

III. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor (pembangunan gedung, sarana dan prasarana, infrastruktur dan lain-lain) sebagai salah satu faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gresik.
2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap komitmen dalam menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Komisi II DPR RI mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pembangunan mal pelayanan publik guna memberikan kepastian kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, akuntabel, dan transparan.
4. Komisi II DPR RI mendorong Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik di daerah kepulauan untuk memastikan masyarakat kepulauan mendapat kemudahan dalam mengakses pelayanan publik.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kabupaten Gresik pada tanggal 17 s/d 19 Januari 2019. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.